

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002022116580, 30 Desember 2022

Pencipta

Nama : **Dr. Muzdalifah, SE, M.Si**
Alamat : Jl. Brig. Jend. H, Hasan Basry Komplek Meranti XI No.12 Rt.035
RW 03 Banjarmasin Kode Pos 70125, Banjarmasin, KALIMANTAN
SELATAN, 70125
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Muzdalifah, SE, M.Si**
Alamat : Jl. Brig. Jend. H, Hasan Basry Komplek Meranti XI No.12 Rt.035
RW 03 Banjarmasin Kode Pos 70125, Banjarmasin, KALIMANTAN
SELATAN, 70125
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Tulis Lainnya**
Judul Ciptaan : **Policy Brief Isu Strategis Kemiskinan Dan Kesenjangan Kota
Banjarmasin Tahun 2023**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 22 September 2022, di Banjarmasin

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000432324

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.



POLICY BRIEF ISU STRATEGIS KEMISKINAN DAN KESEJAJARAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

Dr. Muzdalifah, SE, M.Si

Policy Brief LKEPD ULM No.003, April 2023

Pendahuluan

Kondisi kemiskinan Kota Banjarmasin di tahun 2021 yang digambarkan dengan persentase penduduk miskin (P0) adalah sebesar 4,89% naik dari 4,39% di tahun 2020. Terjadinya pandemi C 19 menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan ini, hal yang sama juga terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan kecuali di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mengalami penurunan sebesar (-6,38%) (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2021a).

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2019-2021

KABUPATEN KOTA	2019	2020	2021	r (%)
TANAH LAUT	4,51	4,26	4,57	7,28
KOTABARU	4,49	4,22	4,86	15,17
BANJAR	2,72	2,55	3,04	19,22
BARITO KUALA	4,63	4,51	5,11	13,30
TAPIN	3,41	3,06	3,60	17,65
HULU SUNGAI SELATAN	5,33	5,17	4,84	-6,38
HULU SUNGAI TENGAH	5,93	5,64	6,18	9,57
HULU SUNGAI UTARA	6,50	6,14	6,83	11,24
TABALONG	6,01	5,72	6,27	9,62
TANAH BUMBU	4,85	4,60	4,82	4,78
BALANGAN	5,55	5,32	6,07	14,10
KOTA BANJARMASIN	4,20	4,39	4,89	11,39
KOTA BANJAR BARU	4,30	4,01	4,40	9,73
KALIMANTAN SELATAN	4,55	4,38	4,83	10,27
INDONESIA	9,22	10,19	7,89	-22,57

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2021), diolah

Dibandingkan dengan level provinsi dan nasional, persentase penduduk miskin Kota Banjarmasin tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional. Dari angka pertumbuhan tahun 2020 ke 2021 terjadi peningkatan yang lebih besar di Kota Banjarmasin dibandingkan provinsi dan nasional. Hal ini mengisyaratkan bahwa dampak pandemi cukup besar di Kota Banjarmasin, meskipun kontradiktif dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi sebesar 3,41% di tahun yang sama, jika paradigma pembangunan berorientasi pada pertumbuhan seharusnya hubungan keduanya adalah positif, namun secara rasional angka inflasi Kota Banjarmasin tahunan juga tinggi yakni 2,54 tahun 2021 (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2022b). Karena tingginya inflasi ini maka pertumbuhan ekonomi Kota Banjarmasin secara riil hanya tumbuh 0,87% saja.

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2021a).

1. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
2. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

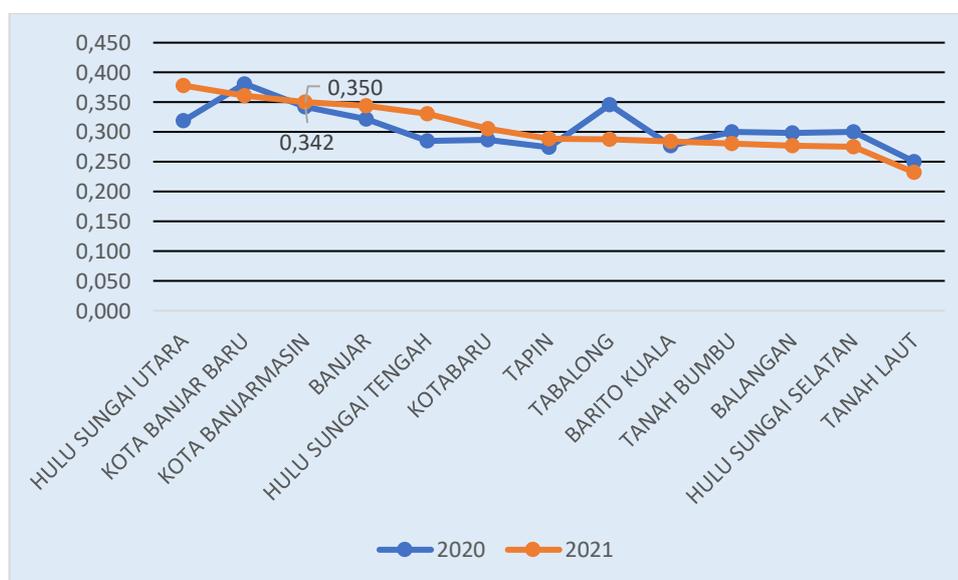
Garis kemiskinan Kota Banjarmasin tahun 2020 sebesar Rp. 543.546,- naik menjadi Rp. 606.330,- (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2021a). Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya harga kebutuhan minimum makanan dan kebutuhan minimum non makanan sebagai akibat dari naiknya inflasi secara global yang berimbas sampai ke Kota Banjarmasin. Jumlah penduduk miskin pun akan ikut meningkat terutama mereka yang masuk pada kelompok penduduk rentan miskin (*vulnerable*) yaitu pengeluarannya berada persis di atas garis kemiskinan namun jaraknya tidak terlalu jauh.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam pembahasan kemiskinan adalah tentang Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin

terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pada tahun 2019 nilai indeks sebesar 0,810 turun menjadi 0,540 tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar 0,555 naik kembali (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2021b).

Hal lainnya terkait kemiskinan adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada tahun 2019 nilai indeks sebesar 0,260 turun menjadi 0,110 tahun 2020 dan tahun 2021 kondisinya tetap tidak berubah (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2021c).. Nilai indeks ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin merata pada suatu kondisi tertentu yaitu di P1 yang cukup dalam indikasinya maka kondisi kemiskinan relatif merata pada kedalaman yang sama dengan kata lain makin banyak penduduk yang berada di level kemiskinan tertentu/terkelompok dan untuk ini diperlukan upaya yang serius.

Kondisi kesenjangan Kota Banjarmasin di tahun 2021 yang digambarkan dengan angka gini ratio adalah sebesar 0,35 naik dari 0,34 di tahun 2020 dan tergolong pada kesenjangan yang sedang. Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Menurut Oshima dalam BPS Pulang Pisau Kalimantan Tengah (2021), jika nilai Gini ratio < 0,3 berarti tingkat ketimpangan Pendapatan (TKP) rendah (distribusi pendapatan semakin merata), Gini ratio bernilai 0,3-0,5 berarti TKP sedang, dan Gini ratio > 0,5 TKP tinggi.



Gambar 1. Gini Ratio Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan
Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2022)

Gini ratio Kota Banjarmasin lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan (0,332 tahun 2020 dan 0,330 tahun 2021), namun lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini ratio Indonesia (0,385 tahun 2020 dan 0,381 tahun 2021), Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota diketahui bahwa posisi Kota Banjarmasin berada di urutan ke-3 yang memiliki nilai gini ratio terbesar.

Target RKPD 2023 dan Realisasi Kemiskinan dan Kesenjangan 2021

Capaian tahun 2021 persentase penduduk miskin sebesar 4,89% jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 4,39% mengalami peningkatan sebesar 0,50%, penduduk miskin bertambah menjadi sebanyak 32.397 jiwa. Kondisi ini berhubungan erat dengan dampak pandemi, dimana terjadinya pembatasan aktivitas masyarakat dalam rangka mengendalikan dan mengurangi penyebaran virus yang berakibat pada pengurangan jam kerja, sampai pengurangan pegawai (PHK) dan banyak pula usaha yang gulung tikar.

Disisi lain pemerintah punya kewajiban untuk pengurangan penduduk miskin sehingga target 2022 dan target RKPD 2023 mengarah pada pengurangan kemiskinan dengan harapan semakin terkendalinya penyebaran virus dengan gencarnya pelaksanaan vaksinasi dan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan menjadi salah satu kekuatan yang sifatnya eksternal, kekuatan internal sendiri adalah bersumber dari masyarakat miskin yang masih bisa berdaya untuk bisa melakukan kegiatan usaha dengan berbagai bentuk bantuan lewat program pemulihan ekonomi nasional (baik skill maupun permodalan). Meskipun demikian target tahun 2022 masih diproyeksikan meningkat yakni sebesar 4,91%-5,04%, karena masyarakat secara umum melakukan penyesuaian dengan kondisi baru, dan mulai tahun 2023 target Kemiskinan dalam RKPD Kota Banjarmasin tahun 2023 mulai menurun yaitu sebesar 4,20%-4,35%.

Capaian tahun 2021 gini ratio Kota Banjarmasin lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Kondisi ini mencerminkan tingkat kesenjangan sedang, selaras dengan penjelasan Bappenas point ke-10 tentang kesenjangan. Kesenjangan pendapatan sedang mengalami kenaikan, 10 persen orang-orang terkaya menguasai 40 persen dari total pendapatan global. Di lain pihak, 10 persen orang-orang termiskin hanya mendapat antara 2 sampai 7 persen dari total pendapatan global. Di negara-negara berkembang, kesenjangan ini telah

meningkat sebanyak 11 persen jika kita menghitung berdasarkan pertumbuhan populasi (Bappenas, 2022)

Menditilkan Target Kemiskinan dan Kesenjangan 2022 dan 2023

Target Kemiskinan dalam RKPD Kota Banjarmasin tahun 2023 adalah sebesar 4,20%-4,35%, sementara untuk tahun 2022 diproyeksikan sebesar 4.91%-5,04%. Berdasarkan apa yang telah dicapai Kota Banjarmasin tahun 2021 yakni sebesar 4,89%, maka pencapaian penurunan kemiskinan ini harus dilakukan secara terencana dan sistematis, mengingat jika diasumsikan penduduk dengan jumlah penduduk sama dengan tahun 2021 (662.320 jiwa) maka jumlah penduduk miskin yang harus menjadi fokus kebijakan pengurangan penduduk miskin tahun 2022 adalah sebanyak 139 - 993 jiwa dan tahun 2023 sebanyak 4.702 - 4.507 jiwa.

Tabel 2. Fokus Jumlah Penduduk Miskin
Kota Banjarmasin Skenario Pesimis dan Optimis
Tahun 2022 dan 2023

Keterangan	Prosentase Penduduk Miskin		Jumlah Penduduk Miskin	
	Optimis	Pesimis	Optimis	Pesimis
Capaian Tahun 2021	4,89		32.387	
Target Tahun 2022	4,91	5,04	32.520	33.381
Target RKPD tahun 2023	4,20	4,35	27.817	28.811
Jumlah Penduduk 2021*	662.320			
Pengurangan Penduduk Miskin				
Target Tahun 2023			132	993
Target RKPD tahun 2023			4.702	4.570

Sumber : Hasil Kalkulasi Peneliti (2022)

Jumlah penduduk miskin ini harus dipilah berdasarkan kondisi spasial dan kearahannya. Kendala klasik dari setiap kebijakan yang akan diambil atau dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah adalah terbatasnya anggaran, sehingga dalam hal ini pemerintah daerah harus menentukan pilihan berdasarkan skala prioritas, seperti penjelasan sebelumnya (lihat tabel 2) untuk mendapatkan pencapaian yang optimal, diperlukan langkah strategis selain itu hal lainnya yang sangat penting adalah ketersediaan data seperti dimana saja kantong-kantong kemiskinan, *update* data (penerima data tumpang tindih, ada yang meninggal, pindah domisili dll).

Target 2022 dan target RKPD 2023 kesenjangan mengarah pada pengurangan kesenjangan mengingat sejak tahun 2019 dan terjadinya pandemi semakin melebarkan kesenjangan antar penduduk, Target 2022 yang ditetapkan

Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar 0,29 - 0,32, dan target dalam RKPD 2023 sebesar 0,31. Kedua target yang ditetapkan ini belum pernah menjadi pencapaian Kota Banjarmasin tahun 2017 (0,333), 2018 (0,3877), dan 2019 (0,326). Untuk mencapai target ini tentunya diperlukan upaya yang strategis mengingat potensi inflasi global dan tingginya angka pengangguran adalah fakta yang dihadapi saat ini.

Isu Strategis Kemiskinan dan Kesenjangan 2023

Isu strategis Kemiskinan dan Kesenjangan Kota Banjarmasin yang harus menjadi perhatian dalam rencana pencapaian target RKPD tahun 2023 adalah sebagai berikut;

- Ancaman inflasi global menaikkan sejumlah harga kebutuhan pokok yang merupakan pokok perhitungan untuk penentuan garis kemiskinan, sehingga jika tidak diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat, maka besar kemungkinan prosentase penduduk miskin akan meningkat.
- Tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan serta masyarakat nyaris miskin menjadi bagian yang tidak terlepas dari rencana kebijakan yang diambil pemerintah Kota Banjarmasin
- Terjadinya kenaikan TPT Kota Banjarmasin tahun 2021 sebesar 8,47 % naik lebih tinggi dari TPT Kalsel 4,95% dan Nasional 6,49%. Naiknya tingkat pengangguran berdampak pada banyaknya penduduk yang kehilangan pekerjaan.

Kesimpulan

Pencapaian target Kemiskinan dan Kesenjangan tahun 2022 dan target RKPD tahun 2023 harus diupayakan di tengah berbagai isu strategis yang terjadi sebagai bagian dari dinamika global dan upaya pemulihan ekonomi yang sudah dilaksanakan pemerintah. Dengan asumsi jumlah penduduk sama dengan tahun 2021 (662.320 jiwa) maka jumlah penduduk miskin yang harus menjadi fokus kebijakan pengurangan penduduk miskin tahun 2022 adalah sebanyak 139 - 993 jiwa dan tahun 2023 sebanyak 4.702 - 4.507 jiwa. Harapan dari pengurangan kemiskinan adalah menekan angka kesenjangan.

Jumlah penduduk miskin ini harus dipilah berdasarkan kondisi spasial dan keparahannya untuk mendapatkan pencapaian yang optimal, diperlukan langkah strategis melalui inovasi yang komprehensif seperti pembangunan kawasan kantong kemiskinan sekaligus juga memberdayakan masyarakat miskin

yang nyaris miskin yang diharapkan bisa menggerakkan perekonomian, selain itu hal lainnya yang sangat penting adalah ketersediaan data seperti dimana saja kantong-kantong kemiskinan, *update* data (penerima data tumpang tindih, ada yang meninggal, pindah domisili dll).

Rekomendasi Kebijakan

1. Melakukan inovasi secara komprehensif terhadap kantong kemiskinan misalnya dengan melakukan perbaikan rumah dan penghuninya melalui pemberian bansos bagi masyarakat miskin yang mengalami kemiskinan parah, membantu anak-anak untuk mengakses pendidikan serta sarana air bersih, dan pemberian makanan tambahan untuk mengurangi stunting
2. Pemulihan daya beli masyarakat melalui program dan kebijakan yang sudah ditetapkan dan menjaga inflasi terkendali, agar kenaikan garis kemiskinan dapat dihadapi oleh masyarakat terutama masyarakat nyaris miskin agar tidak masuk pada masyarakat miskin, dan yang miskin kemiskinannya tidak semakin parah.
3. Membantu masyarakat yang terkena dampak pandemik dan kehilangan pekerjaan untuk mendapatkan pelatihan dan akses permodalan agar mampu berwirausaha sehingga menjadi pembuka lapangan kerja bagi yang lain.

Daftar Referensi

- Bappenas. (2022). *Berkurangnya Kesenjangan Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara*. Bappenas. <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-10/>
- BPS Provinsi Kalimantan Selatan. (2021a). *Garis Kemiskinan Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Selatan*. BPS Provinsi Kalimantan Selatan. <https://kalsel.bps.go.id/indicator/23/139/1/garis-kemiskinan.html>
- BPS Provinsi Kalimantan Selatan. (2021b). *Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan*. BPS Provinsi Kalimantan Selatan.
- BPS Provinsi Kalimantan Selatan. (2021c). *Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan*. BPS Provinsi Kalimantan Selatan. <https://kalsel.bps.go.id/indicator/23/138/1/tingkat-keparahan-kemiskinan-p2-.html>
- BPS Provinsi Kalimantan Selatan. (2022a). *Gini Ratio Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan*. BPS Provinsi Kalimantan Selatan. <https://kalsel.bps.go.id/indicator/23/152/1/gini-ratio.html>

BPS Provinsi Kalimantan Selatan. (2022b). *Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan*.
BPS Provinsi Kalimantan Selatan.
<https://kalsel.bps.go.id/indicator/3/1/2/inflasi.html>

BPS Pulang Pisau Kalimantan Tengah. (2021).
<https://pulpiskab.bps.go.id/indicator/23/182/1/gini-rasio.html>. BPS Pulang
Pisau Kalimantan Tengah.
<https://pulpiskab.bps.go.id/indicator/23/182/1/gini-rasio.html>